LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 merupakan perwujudan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian dan Lembaga Non Kementerian wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sebagai alat penilaian kualitas kinerja yang diharapkan dapat mendorong etos kerja seluruh personill agar menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik ddan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan pembangunan Kependudukan dan KB untuk mendukung pencapaian terwujudnya “Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”.

Selanjutnya Kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengarahannya dan juga kepada para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pemikiran dan masukan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang.

Muara Beliti, Februari 2017
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Drs. JEMAIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 199103 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
RINGKASANEKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Gambaran Umum SKPD 2

Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I.3 Sumber Daya 7

I.4 Permasalahan yang dihadapi SKPD Tahun 2016 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Jangka Menengah (RENSTRA-SKPD) 10

Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Kebijakan

Program dan Kegiatan

II.2 Uraian Rencana/Perjanjian Kinerja Tahun 2016..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi / SKPD 22

III.2 Realisasi Anggaran 38

BAB IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan..... 40

IV.2 Langkah SKPD Pada Masa Yang Akan Datang..... 40

LAMPIRAN
(Pengukuran Kinerja Tahun 2017, Rencana dan Penetapan Kinerja Tahun 2017)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Foto Kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, maka BKKBN menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja.
Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.
3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Aspek tersebut menjadi pendukung sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana

Urusan Pembangunan Keluarga

Dalam pencapaian 3 (tiga) urusan pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB
2. Meningkatnya Peserta KB Aktif
3. Menurunnya kebutuhan KB yang tidak terpenuhi
4. Menurunnya disparitas Total Fertility Rate
5. Pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja
6. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
7. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk
8. Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi KB bagi peserta KB Aktif
9. Meningkatnya kesertaan ber-KB bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
10. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Remaja
11. Meningkatnya jumlah keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Lansia
12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun
13. Meningkatnya Penggunaan MKJP
14. Angka kelahiran pada remaja 15-19 tahun(ASFR)
15. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

BAB I
Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu " Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sejalan dengan arah pembangunan pemerintahan, dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukannya didukung oleh Misi 1 Kabupaten Musi Rawas, yaitu "Memperbaiki Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur" dengan arah kebijakan mengembangkan konsep keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Implementasi akuntabilitas kinerja diwujudkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui penerapan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang menyeluruh pada setiap tingkat unit kerja.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu :

1. Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk.
2. Berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan.

3. Mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan pedesaan.
4. Penyediaan data dan informasi penduduk.
5. Penyerasian kebijakan kependudukan.

Aspek tersebut menjadi pendukung sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam pelaksanannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi dan pengawasan pada setiap unit kerja dengan tujuan terciptanya kinerja yang akuntabel. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan salah satu lembaga daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memiliki 3 (tiga) urusan pokok, yaitu :

1. Urusan Pengendalian Penduduk
2. Urusan Keluarga Berencana
3. Urusan Pembangunan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan tugas pembantuan yang di berikan Pemerintah Pusat.

I.2 GAMBARAN UMUM SKPD

A. Tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang merupakan amandemen UU No. 10 tahun 1992 telah mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Dalam UU No. 52 tahun 2009 disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota harus membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana SKPD yang mengurusi masalah kependudukan dan KB. Bagi program KB, Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah secara tegas diwajibkan meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi kepada masyarakat.

Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu lembaga daerah yang berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Nomenklatur Lembaga/Instansi KB dibuat tersendiri tanpa bergabung dengan instansi lainnya, yaitu dengan nama Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) dan diperkuat dengan Peraturan Bupati No. 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun 2016 Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas mengalami kenaikan dari Tipe C menjadi Tipe A sehingga berganti nama menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tepatnya November 2016, Bupati Musi Rawas mengeluarkan Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.

B. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
    a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
    a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
        1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
        2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
        3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
    b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
        1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;

2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana (KB).

c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

Kedudukan Dinas

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaka daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana yang dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Gambar I-1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS

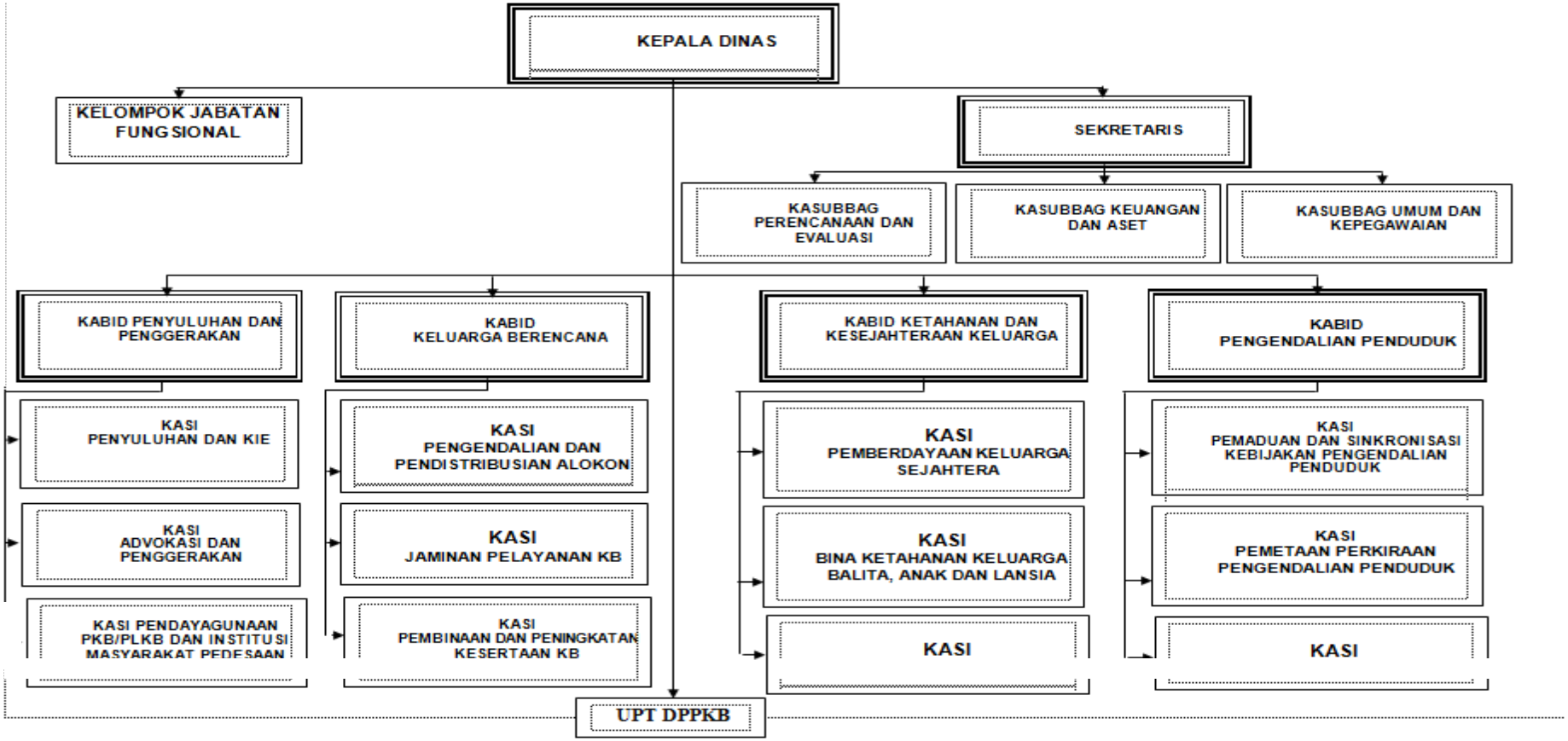

I.3 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas per 30 Desember 2016 berjumlah 66 Orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel I.1 – I.2.

Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia
Diklasifikasikan Berdasarkan Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I	-	-	-	-	-
II	2	2	3	-	7
III	9	5	4	32	50
IV	5	3	1	-	9
Jumlah					66

Jumlah Sumber Daya Manusia/Personalia Diklasifikasikan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	23
5.	Staf	12
6.	Fungsional	25
Jumlah		66

B. SARANA PENUNJANG

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya. Bangunan gedung kantor terdiri dari 1 (satu) lantai seluas 363 M^2 yang terletak diatas tanah seluas 1.990 M^2 di Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Agropolitan Center.

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubeler, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari

pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam Tahun Anggaran 2016 terdapat inventaris / peralatan kantor yang terdiri dari :

Inventaris Barang Peralatan dan Mesin Tahun 2016

No.	Jenis Barang	Jumlah (Bh/Unit)
1	Kendaraan Bermotor	3 Unit
2	Mesin Hitung Manual	5 Buah
3	Lemari Kayu	6 Buah
4	Mesin Absensi	1 Unit
5	Kursi Besi /Metal	14 Buah
6	Kursi Plastik	126 Buah
7	AC Unit	6 Buah
8	Handphone	79 Buah
9	Gedung Kantor (Rumah penjaga kantor)	1 Buah

I.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SKPD TAHUN 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki 2 (dua) Fungsi Utama sekaligus. *Pertama*, Laporan akuntabilitas merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Kepala Perwakilan BPKP. *Kedua*, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut merupakan cermin maksud dan tujuan penyusunan dan Penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 adalah sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dengan meminimalisir permasalahan yang dihadapi tahun 2016 ini. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut, antara lain :

a. Masih ada desa-desa wilayah kabupaten Musi Rawas yang sulit dijangkau berkaitan dengan sarana jalan maupun keamanan;

b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
c. Masih rendahnya partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana; dan
d. Dalam penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB berbasis Tehnologi Informasi (TI) di Kecamatan atau Desa belum dapat dioptimalkan karena sarana kebutuhan untuk Tehnologi Informasi (TI) tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal.

BAB II

Perencanaan Kinerja

II.1 URAIAN SINGKAT VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (RENSTRA-SKPD)

Rencana Strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Suatu Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan perencanaan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

A. Visi dan Misi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas merupakan hasil akomodasi dari BKKBN Pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021, yaitu :

“Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berencana Menuju Keluarga Sejahtera Dalam MURA SEMPURNA 2021”

Dalam upaya menuju visi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menjabarkannya kedalam Misi, sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berencana, melalui ;
   - ✓ Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;
   - ✓ Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2017 diharapkan menurun dari 1,27% menjadi 1,18%.
2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan KB, melalui :
   - ✓ Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
   - ✓ Meningkatkan prevalensi peserta KB Pria;
   - ✓ Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed);
   - ✓ Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;
   - ✓ Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun;
   - ✓ Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
   - ✓ Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari WUS (15-49 tahun).
3. Meningkatkan Pembangunan Keluarga, melalui :
   - ✓ Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat;
   - ✓ Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK KRR/M);
   - ✓ Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   - ✓ Pembinaan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga.

B. Tujuan dan Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yaitu meningkatnya cakupan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui KB dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Tujuan Strategis - Sasaran Strategsi – Indikator Kinerja

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)
	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB	Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif (CPR)
	Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
	Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif
	Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun
	Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase penggunaan MKJP
	Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
Meningkatnya pembangunan keluarga	Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	Cakupan Bina Keluarga Balita
		Cakupan Bina Keluarga Remaja
		Cakupan Bina Keluarga Lansia
	Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)

	(PIK KRR)	
	Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Dari indikator kinerja diatas, dipilih indikator kinerja utama yang mewakili indikator kinerja-indikator kinerja diatas yang mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas :

Laju Pertumbuhan Penduduk

Penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat berimbas pada terjadinya penurunan angka ketergantungan yang merupakan jendela peluang (*window ofopportunity*) untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga jendela peluang tersebut dapat bermanfaat antara lain untuk : (1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga mempunyai kompetensi dan daya saing tinggi; (2) tersedianya kesempatan kerja produktif, agar penduduk usia kerja yang jumlahnya besar dapat bekerja untuk meningkatkan tabungan rumah tangga; (3) diinvestasikannya tabungan rumah tangga untuk menciptakan kesempatan kerja produktif; dan (4) meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk memasuki pasar kerja. Di Indonesia, jendela peluang tersebut diperkirakan hanya akan terjadi sekali sepanjang sejarah, dengan periode kejadian yang sangat pendek yaitu pada tahun 2020−2025.

Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)

Tingkat prevalensi peserta KB aktif dimaksudkan besaran capaian jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan alat kontrasepsi atau CPR (Contraceptive Prevalence Rate) yang berkisar pada angka 71 persen pada tahun 2016 dan diharapkan meningkat menjadi 76 persen pada tahun 2021.

Rasio Antara Kebutuhan KB dan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Rasio Antara Kebutuhan KB dan KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) dimaksudkan perbandingan antara jumlah wanita yang sudah tidak ingin mempunyai anak atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan dan tidak menggunakan alat kontasepsi dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur yang berkisar pada angka 12,48% pada tahun 2016 (masih diatas nasional 10,48%) dan diharapkan semakin menurun menjadi 6,3% pada tahun 2021.

Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) dimaksudkan jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu dengan capaian 2,47 pada tahun 2016 dan diharapkan semakin menurun menjadi 1,97 pada tahun 2021.

Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49 tahun)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) dimaksudkan bahwa usia 15-19 tahun tersebut merupakan usia remaja sehingga diharapkan mereka dapat menunda usia perkawinan, dengan capaian 59 persen pada tahun 2016 dan diharapkan semakin menurun menjadi 49,1 persen pada tahun 2021.

Kelahiran pada usia remaja ini masih sering terjadi karena alasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan remaja sehingga peranan advokasi baik melalui penyuluhan maupun media cetak, elektronik serta media luar ruang sangat perlu dioptimalkan.

Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari WUS (15-49 tahun)

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun) dimaksudkan lost control dari WUS yang menganggap bahwa kecil kemungkinan mereka untuk melahirkan dikarenakan alasan antara lain melakukan senggama teputus atau berhenti sejenak menggunakan kontrasepsi karena alasan kesehatan (kegemukan, muncul flek diwajah) atau usia resiko

tinggi melahirkan (35 tahun keatas), akhirnya dengan berbagai alasan tersebut tanpa disadari terjadi kehamilan.

Tujuan Strategis 1

Meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera

Meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera menjadi salah satu tujuan strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam rangka melaksanakan peningkatan pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera diperlukan data dan informasi yang akurat yang diperoleh melalui hasil pendataan dan pencapaian serta pengamatan langsung di lapangan dari masing-masing bidang yang kemudian dimanfaatkan oleh pengelola program dan pembuat kebijakan dalam merencanakan, menyusun dan mengevaluasi kebijakan, strategi program dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk mencapai tujuan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. Menurunnya total fertility rate/TFR
2. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

Tujuan Strategis 2

Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami berbagai tantangan dalam melaksanakan pelayanan KB. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga kesehatan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang sesuai standar serta penguatan kepentingan program Keluarga Berencana itu sendiri dalam membentuk kehidupan keluarga yang lebih berkualitas. Hal ini akan terus diperbaiki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB.

Untuk mencapai tujuan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

1. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

2. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif
3. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun
4. Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
5. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Tujuan Strategis 3

Meningkatnya pembangunan keluarga

Dalam menggerakkan peningkatan pembangunan keluarga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membina kelompok masyarakat yang terdiri dari Bina Keluarga Berencana (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta UPPKS. Dalam proses pembinaannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana menjadi fasilitator penting bagi setiap kelompok guna tercapainya pembangunan keluarga setiap tahunnya. Selain itu, remaja juga menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan keluarga di masa yang akan datang.

Untuk mencapai tujuan ini, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat
2. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)
3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)

C. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan–kebijakan dan

program-program. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menetapkan sejumlah Strategi yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

Tabel 2.2 Tujuan Strategia – Sasaran Strategis – Kebijakan

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera	1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	1 Peningkatan advokasi dan KIE kepada masyarakat terhadap program pengendalian penduduk dan KB 2. Penguatan kelembagaab kependudukan dan keluarga berencana yang efektif serta penguatan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	
2	Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB	1. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	1. Penguatan akses pelayanan KB MKJP dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas 2. Penguatan peran balai penyuluhan KB sebagai pusat pengendali program dan kegiatan di lini lapangan 3. Pembentukan “Kampung KB” percontohan 4. Peningkatan dukungan kemitraan dan penggerakan program dan kegiatan di lini lapangan
		2. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	
		3. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	
		4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	
		5. Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
		6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	

3	Meningkatnya pembangunan keluarga	1. Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	1. Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan ketahan keluarga melalui poktan di masyarkat
		2. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)	2. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga
		3. Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	3. Penguatan pembinaan/ pelestarian kesertaan ber-KB (PA)

D. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah :

Tabel 2.3 Program – Kegiatan

1.	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
		4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		8. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11. Penyediaan Makanan dan Minuman
		12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

		13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
		14. Penyediaan Jasa pendukung Adminstrasi Teknis/Perkantoran
		15. Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
		3. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
		4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		5. Pengadaan Mebeuler
		6. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
		7. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Di SKPD
5.	Program Keluarga Berencana	1. Pelayanan KIE
		2. Pembinaan Keluarga Berencana
		3. Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
		4. Pendataan Keluarga 5. Peningkatan Kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KB
		6. Analisa dan evaluasi data hasil pencapaian programKB
6.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
7.	Program Pelayanan Kontrasepsi	1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
		2. Operasional Klinik KB
8.	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP program KB
		2. Hari Keluarga Nasional
9.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Lomba Catur Bina

II.2 URAIAN RENCANA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggung jawab/ kinerja. Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 disajikan pada tabel di bawah ini.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / SKPD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 dilakukan dengan caramembandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikianjuga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2016 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagaiamanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum PenetapanIndikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan PeraturanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26 Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas. Tujuan utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tidak mencantumkan target yang akan dicapai pada tahun 2016 karena target capaian IKU ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016. IKU yang di tetapkan untuk Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas telah digunakan sebagai indikator keberhasilan dan analisis pencapaian sasaran kinerja sebagaimanan direncanakan dalam Penetapan Kinerja Tahun yang diuraikan dalam analisis capaian kinerja.

A. Uraian Perbandingan Capaian Antara Target dan Realisasi Tahun 2016

SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2016 menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran tersebut

Tabel Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Tahun 2016

Sasaran Pertama: Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	100	2,47	90,69

Sasaran Kedua: Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20	100	1,40	85,71

Sasaran Ketiga: Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif (CPR)	75,3	100	71,38	94,79

Sasaran Keempat: Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,7	100	12,48	125,80

Sasaran Kelima: Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif	75,3	100	71,38	94,79

Sasaran Keenam: Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	3,0	100	1,86	161,29

Sasaran Ketujuh: Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase penggunaan MKJP: 1. Peserta KB Aktif (PA)	2.735	100	2.551	93,27
	2. Peserta KB Baru (PB)	10.398	100	22.521	216,58

Sasaran Kedelapan: Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	3,4	100	3,08	110,39

Sasaran Kesembilan: Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	Cakupan Bina Keluarga Balita	4.680	100	4.326	90,43
	Cakupan Bina Keluarga Remaja	1.405	100	1.405	100
	Cakupan Bina Keluarga Lansia	663	100	663	100

Sasaran Kesepuluh: Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	65,6	100	59	111,19

Sasaran Kesebelas: Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	1.777 PUS KPS dan KS 1= 1.546 yang ber-KB (87%)	100	1.777 PUS KPS dan KS 1= 1,358 yang ber-KB (76,42%)	87,84%

Sasaran setiap SKPD: Meningkatnya kinerja aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Tercapainya program pelayanan administrasi perkantoran sesuai target	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,-	100	2.403.000,-	96,12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000,-	100	30.160.957,-	85,20
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	9.050.000,-	100	4.445.000,-	49,12
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	14.400.000,-	100	9.969.000,-	69,23
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000,-	100	9.000.000,-	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.640.000,-	100	24.638.000,-	99,99
	Penyediaan alat tulis kantor	70.481.000,-	100	70.220.900,-	99,63
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.563.000,-	100	30.560.500,-	99,99
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	5.000.000,-	100	4.920.000,-	98,40
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan	22.500.000,-	100	21.351.000,-	94,89
	Penyediaan makanan dan minuman	136.624.000,-	100	136.868.000,-	99,96
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah daerah	230.000.000,-	100	229.957.038,-	99,98
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55.000.000,-	100	47.750.000,-	86,82
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/perkantoran	507.600.000,-	100	502.950.000,-	99,08
	Penyediaan Jasa Dokumentasi,Publikasi dan Dekorasi	15.600.000,-	100	14.313.000,-	91,75

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana sesuai target	Pembangunan Gedung Kantor	158.936.000,-	100	158.359.000,-	99,64
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	36.000.000,-	100	35.800.000,-	99,44
	Pengadaan Mebeleur	75.600.000,-	100	75.600.000,-	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	1.100.000,-	100	1.061.000,-	96,45
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	147.240.000,-	100	135.915.750,-	92,31
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.353.850. 000,-	100	1.346.648. 000,-	99,47

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	246.600.000,-	100	242.925.000,-	98,51
Tercapainya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai target	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	10.000.000,-	100	10.000.000,-	100
Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD	48.430.000,-	100	48.430.000,-	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2016 terealisasi dengan baik. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan pra sarana serta regulasi yang ada baik di tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.

B Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Lalu dengan Capaian Kinerja Tahun 2016

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun lalu dengan capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun Lalu
dengan Capaian Kinerja Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	3	3	3,2	3,2	2,24	2,47	90,69

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0	0	0	1,22	1,20	1,40	85,71

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif (CPR)	93,81	75	75,84	78,5	75,3	71,38	94,79

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0	0	0	0	15,7	10.955 dari 87.743 PUS (12,48%)	125,80

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif	93,81	75	75,84	78,5	75,3	71,38	94,79

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	7.430	7.430	7.530	7.530	3,0	1,86	161,29

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase penggunaan MKJP: 1. Peserta KB Aktif (PA)	27.681	28.681	15.106	10.277	10.398	22.521	216,58
	2. Peserta KB Baru (PB)	4.881	5.881	5.077	1.212	2.735	2.551	93,27

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2							
Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	0	0	0	10,2	3,4	3,08	110,39

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	Cakupan Bina Keluarga Balita	5.867	5.667	4.880	4.880	4.680	4.326	90,43
	Cakupan Bina Keluarga Remaja	135	135	135	135	1.405	1.405	100
	Cakupan Bina Keluarga Lansia	152	157	157	157	663	663	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	6.518	6.347	6.618	6.618	65,6	59	111,19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	23.939	24.039	24.039	24,039 pus Pra S+KS I=34.595	1.777 PUS KPS dan KS 1= 1.546 yang ber-KB (87%)	1.777 PUS KPS dan KS 1= 1,358 yang ber-KB (76,42%)	87,84 %

C. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016 Sampai Dengan Target Tahun Terakhir Renstra 2017

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016 sampai dengan target tahun terakhir renstra disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Target Akhir RenstraTahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	3	3	3,2	3,2	2,47	2,18	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0	0	0	1,22	1,40	1,18	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif (CPR)	93,81	75	75,84	78,5	71,38	75,6	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0	0	0	0	10.955 dari 87.743 PUS (12,48 %)	12,5	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif	93,81	75	75,84	78,5	71,38	75,6	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	6.430	7.430	3.750	7.563	1.377	5.019	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase penggunaan MKJP: 1. Peserta KB Aktif (PA)	27.681	27.247	17.913	21.661	22.521	9.359	100
	2. Peserta KB Baru (PB)	4.900	5.881	4.749	2.847	2.551	2.462	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2							
Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	0	0	0	10,2	3,08	3,2	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	Cakupan Bina Keluarga Balita	4.880	5.667	4.680	4.880	4.326	4.409	100
	Cakupan Bina Keluarga Remaja	112	112	125	135	1.405	1.496	100
	Cakupan Bina Keluarga Lansia	118	157	145	157	663	686	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	6.518	8.156	2.625	5.563	813 (59%)	858 (62,3%)	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2017	%
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	20.839	22.837	22.750	20.325	1.777 PUS KPS dan KS 1= 1,358 yang ber-KB (76,42 %)	1.385	100

D. Capaian Kinerja Sasaran SPM sampai dengan Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2016, berkisar antara 216,58% sampai 85,71%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kumulatif pencapaian sasaran kinerja di tahun 2016 tergolong berhasil dan meningkat jika dibandingkan dengan dengan tingkat keberhasilan yang dicapai di tahun 2015 yang berkisar 235,90 – 59,38%.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Sasaran serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran seperti yang dijelaskan di atas antara lain didukung oleh :

e. Semakin meningkatnya SDM pelaksana pelayanan KB dan KIE kepada PUS, Remaja dan Anggota keluarga lainnya untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BKKBN Propinsi.

f. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

g. Kedudukan organisasi dan tugas pokok Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Namun demikian, ada beberapa indikator yang walaupun pencapaiannya sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih ada desa-desa wilayah kabupaten Musi Rawas yang sulit dijangkau berkaitan dengan sarana jalan maupun keamanan
2. penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas yang termaksud dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Kendala yang Dihadapi dan Langkah Antisipatif/Solusi yang diambil

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:

1. Letak geografis beberapa kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yang jauh serta faktor alam yang kurang mendukung,
2. Minimnya tenaga personil untuk ditempatkan sebagai tenaga pelaksana kegiatan.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka diambil langkah-langkah antisipatif/ solusi sebagai berikut:

1. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan *(Time Schedule).*
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing.
3. Meningkatkan disiplin pegawai staf Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas sesuai manajemen personalia.
4. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan.
6. Peningkatan penggunaan fasilitas yang telah tersedia.
7. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, adalah bahwa sumber daya keuangan belum cukup optimal dalam memenuhi atau

mencakup seluruh kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal).

- Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM), adalah bahwa sumber daya manusia belum cukup optimal dalam memenuhi atau mencakup petugas di lapangan dalam peningkatan mutu dan kualitas pelayanan KB yang prima.

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja khususnya indikator kinerja utama adalah :

1. Capaian Indikator Total Fertility Rate (TFR) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 adalah 90,69% dari 100%. Sasaran Strategis ini bertujuan agar SKPD dapat menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR). Indikator ini juga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk. Pada tahun 2015 realisasi BKKBN Pusat adalah 2,28 anak per wanita dengan target 2,37 anak per wanita (sumber : LAKIP BKKBN 2016), jika dibandingkan dengan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah 92,30%, jika dibandingkan dengan target tahun 2017 (target = 2,18 anak per wanita, sumber : RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2021) adalah 88,25% sehingga masih banyak hal-hal yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada tahun 2017 ini. Adapun yang menjadi kendala tidak tercapainya target adalah :

a) Lokasi geografis beberapa desa di Kecamatan yang cukup jauh sehingga mengakibatkan petugas lapangan dan petugas medis kesulitan menjangkau desa-desa tersebut untuk melakukan kegiatan pelayanan dan sosialisasi;
b) Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya indikator.

Beberapa upaya ini telah dilakukan namun akan ditingkatkan kembali guna pencapaian yang lebih baik :

a) Penigkatan Akses pelayanan KB di daerah yang sulit dijangkau melalui promosi Kampung KB. Kegiatan Kampung KB merupakan kegiatan lintas sektor sehingga melibatkan banyak SKPD terkait, termasuk dalam membuka akses jalan menuju Kampung KB tersebut. Hal ini menguntungkan petugas medis dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan melalui kegiatan ini terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung terkait dengan sejalannya program KKBPK dengan sasaran strategis Kabupaten Musi Rawas.
b) Meningkatkan kegiatan Advokasi dan KIE serta kegiatan Bina Keluarga guna peningkatan partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS), Peningkatan partisipasi pria dalam Program KKBPK, peningkatan pengetahuan wanita tentang Program KKBPK, peningkatan usia kawin pertama serta peningkatan komitmen pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Kegiatan ini dapat direncanakan lebih kreatif lagi terkait dengan ketersediaan anggaran;
c) Meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas melalui MURA SEHAT SEMPURNA.

2. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 adalah 85,71% dari 100%. Laju Pertumbuhan Penduduk apabila dibandingkan dengan realisasi BKKBN Pusat tahun 2015 lalu (Realisasi 2015 = 1,43 sumber : LAKIP BKKBN 2016) adalah 97%, sementara jika dibandingkan dengan target tahun 2017 (target = 1,18, sumber : RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016 – 2021) adalah 84,28%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi pada tahun 2017 berjalan ini terkait dengan urusan pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana. Beberapa yang menjadi kendala belum tercapainya target 100% adalah :

a) Diperkirakan banyaknya penduduk yang Migrasi ke Musi Rawas dengan tujuan mencari lapangan kerja, hal ini mengakibatkan belum terdatanya sasaran PUS (Pasangan usia Subur) yang akan menjadi target Peserta KB Baru;

b) Lokasi geografis beberapa desa di Kecamatan yang cukup jauh sehingga mengakibatkan petugas lapangan dan petugas medis kesulitan menjangkau desa-desa tersebut untuk melakukan kegiatan pelayanan dan sosialisasi.

Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan berupaya meningkatkan pencapaian IKU (Laju Pertumbuhan Penduduk) melalui:

a) Berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai jumlah penduduk yang migrasi untuk kemudian menyesuaikan data yang ada pada SKPD (Data Pendataan Keluarga) sehingga PUS yang belum terdata dapat menjadi target akseptor KB di tahun 2017. Selain itu, SKPD juga akan menggalakkan Peserta KB Aktif yang menggunakan KB Non MKJP agar dapat berpindah ke pelayanan kontrasepsi ganti cara menjadi KB MKJP karena memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan KB Non MKJP;
b) Penigkatan Akses pelayanan KB di daerah yang sulit dijangkau melalui promosi Kampung KB. Kegiatan Kampung KB merupakan kegiatan lintas sektor sehingga melibatkan banyak SKPD terkait, termasuk dalam membuka akses jalan menuju Kampung KB tersebut. Hal ini menguntungkan petugas medis dan petugas lapangan dalam melaksanakan tugasnya sehingga diharapkan melalui kegiatan ini terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung terkait dengan sejalannya program KKBPK dengan sasaran strategis Kabupaten Musi Rawas.

3. Capaian Indikator Prepalensi peserta KB aktif/ CPR adalah 94,79 dari 100%. Faktor yang mempengaruhi penurunan TFR, salah satunya adalah peningkatan CPR. Jika dibandingkan dengan capaian BKKBN Pusat tahun 2015 lalu (realisasi 2015 = 60,9, target = 65,2 sumber : LAKIP BKKBN 2016) adalah 117.20%. Namun jika dibandingkan dengan target tahun 2017 (target = 75,6 sumber : RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-2021) baru mencapai 94,41%. Walaupun persentase terlihat sudah baik (mendekati target 100%) namun dalam pelaksanaan kegiatannya, SKPD mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

a) Masih kurangnya pengetahun mengenai Program KKBPK melalui Advokasi dan KIE menjadi peran yang cukup penting dalam membantu keputusan PUS untuk ber-KB;
b) Hasil pencapaian Peserta KB aktif pada tahun 2016 adalah 71,38% (sumber : F/I/Pengendalian Lapangan tahun 2016) sementara hasil pencapaian peserta KB Baru pada tahun 2016 adalah 82,26% (sumber : F/II/Pelayanan Kontrasepsi tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian peserta KB Baru lebih besar dibandingkan Peserta KB Aktif, karena itu di tahun 2017, SKPD menggalakkan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan peserta KB Aktif.

Beberapa hal yang telah diupayakan dan ingin ditingkatkan terkait indikator ini adalah :

a) Meningkatkan pembinaan kesertaan ber-KB melalui kelompok sasaran;
b) Meningkatkan kualitas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan indikator sehingga outcome bias optimal;
c) Meningkatkan kesertaan ber-KB melalui pelayanan KB yang berkualitas dengan ikut serta dalam kegiatan MURA SEHAT SEMPURNA;
d) Meningkatkan kesertaan ber-KB dari Non MKJP menjadi MKJP;
e) Mensosialisasikan pembiayaan pelayanan KB melalui BPJS;
f) Meningkatkan SDM baik petugas medis, petugas lapangan, pelaksana kegiatan melalui pelatihan-pelatihan;
g) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam melaksanakan kegiatan.

4. Capaian Indikator Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) tahun 2016 adalah 111,19%. Realisasi BKKBN Pusat pada tahun 2015 adalah 95,8%. Beberapa yang menjadi faktor keberhasilan ini adalah :

a) Penerimaan yang baik dari remaja yang mengikuti Advokasi dan KIE Program KKBPK;
b) Peran aktif remaja ini juga dituangkan dalam kegiatan PIK R/M;
c) Peningkatan kualitas pembinaan pada Bina Keluarga Remaja (BKR);

d) Peningkatan pengetahun tentang Program KKBPK melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD;
e) Dukungan dana DAK Tahun Anggaran 2016;
f) Dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam setiap kegiatan KB.

Indikator keberhasilan ini akan lebih ditingkatkan lagi di tahun 2017 ini melalui kegiatan yang lebih kreatif dan dekat terhadap lingkungan remaja serta peningkatan keterlibatan orangtua remaja itu sendiri.

5. Capaian Indikator Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) tahun 2016 adalah 125,80%. Realisasi BKKBN Pusat tahun 2015 adalah 73,6%. Yang menjadi faktor keberhasilan indikator ini adalah :

a) Peran mitra dalam rangka pelayanan KB (Bidan Desa, Perangkat Desa, TOGA, TOMA dan lainnya);
b) Keterpaduan program KKBPK dengan lintas sektor melalui program Kampung KB;
c) Ketersediaannya alat dan obat kontrasepsi yang secara rutin dikirimkan melalui mobil Box Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB;
d) Dukungan dana DAK Tahun Anggaran 2016;
e) Dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam setiap kegiatan KB.

Kedepannya, keberhasilan ini akan dipertahankan dan ditingkatkan secara kualitas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih baik lagi sehingga apa yang ditargetkan akan tercapai.

6. Capaian Indikator Kehamilan Tidak Diinginkan/KTD tahun 2016 adalah 110,39%. Pada tahun 2015, capaian BKKBN Pusat adalah 58,7% (capaian = 12,1 target = 7,1 sumber : LAKIP BKKBN 2016). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini antara lain :

a) Tidak adanya kegagalan ber-KB. Hal ini dikarenakan kegiatan konseling berjalan dengan baik sebelum calon akseptor KB memutuskan untuk ber-KB;

b) Pemenuhan kebutuhan KB serta alat dan obat kontrasepsi
c) Pemahaman pengetahun mengenai KB sebelum memutuskan untuk ber-KB;
d) Kegiatan pelayanan KB yang melibatkan tokoh medis yang handal;
e) Dukungan dana DAK Tahun Anggaran 2016
f) Dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam setiap kegiatan KB.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi pelaksanaan rutin, pembangunan dan penerimaan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2016 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung.
b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung.

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

A.Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja tidak langsung (31 Desember 2016) pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas adalah sebesar Rp **5.195.573.351,-** atau 96% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. **5.412.695.385**,-. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami sisa anggaran sebesar Rp. 217.122.034.

B.Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun Anggaran 2016 (sampai dengan 31 Desember 2016) sebesar Rp. **6.553.737.252,-** atau 98**%** dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar**Rp. 6.621.902.000,-** Lebih jelasnya tabel rincian berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
	1	2	(Rp)	%	5
1.	Program Pelayanan Administarsi Perkantoran	1.168.658.000	1.139.506.395	97	29.151.605
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.019.326.000	1.996.308.750	98	23.017.250
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	10.000.000	100	0
4.	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.430.000	48.430.000	100	0
5.	Program Keluarga Berencana	1.743.485.000	1.731.398.589	99	12.086.411
6.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	117.478.000	117.478.000	100	0
7.	Program Pelayanan Kontrasepsi	468.332.000	467.427.203	99	904.797
8.	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.002.321.000	1.000.366.315	99	1.954.685
9.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	43.872.000	42.822.000	97	1.050.000
	Total	6.621.902.000	6.553.737.252	98	68.164.748

Tabel 2.4
Rencana/Perjanjian/Penetapan Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016

Tujuan Pertama : Meningkatnya pengendalian penduduk melalui KB menuju keluarga sejahtera

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
1	2	3	4
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	2,24	**1. Program Keluarga Berencana** **2. Program Pelayanan Kontrasepsi KB**
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,20	

Tujuan Kedua : Meningkatnya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KB

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif	Tingkat prevalensi peserta KB Aktif (CPR)	75,3	**1. Program Keluarga Berencana** **2. Program Pelayanan Kontrasepsi KB** **3. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**
Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15,7	
Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif	75,3	
Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 Tahun	5,0	
Meningkatnya penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Persentase penggunaan MKJP	34,6	
Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	3,4	

Tujuan Ketiga : Meningkatnya pembangunan keluarga

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program
Meningkatnya pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan remaja di masyarakat	Cakupan Bina Keluarga Balita	7,5	**1. Program Kesehatan Reproduksi Remaja** **2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri** **3. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**
	Cakupan Bina Keluarga Remaja	5,5	
	Cakupan Bina Keluarga Lansia	3,0	

Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)	65,6	
Meningkatkan tahapan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I atau menurunkan tingkat kemiskinan keluarga	Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	8,9	

BAB IV

Penutup

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas secara umum telah dilaksanakan mengacu pada RENSTRA 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Pemkab Musi Rawas. Dari uraian laporan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian kinerja sasaran tahun 2016 berkisar antara 216,58 sampai 82,26, angka tersebut menunjukan ada peningkatan keberhasilan yang dicapai dari tahun sebelumnya. Meskipun cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani mengalami peningkatan sebesar 0.76% dari tahun sebelumnya, namun dengan pencapaian sebesar 1.92% tahun ini, belum memenuhi target sebesar 5% ;
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. **5.195.573.351,-** serta Belanja Langsung sebesar **6.553.737.252,- .**

IV.2 LANGKAH SKPD PADA MASA YANG AKAN DATANG

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, maka strategi pemecahan masalah atau langkah yang dilakukan antara lain :

a. Meningkatkan sarana dan prasarana petugas lapangan dalam menjangkau calon peserta KB yang tidak terlayani;
b. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terhadap kinerja pegawai melalui media rapat staf serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
c. Memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu dan hasil sesuai dengan target kinerja;

d. Pengembangan SDM perencana dengan cara pendidikan dan pelatihan perencanaan sehingga SDM dapat kompeten dan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsinya;
e. Meningkatkan disiplin pegawai staf Badan KB Kabupaten Musi Rawas sesuai manajemen personalia;
f. Menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait dilingkungan Pemkab Musi Rawas
g. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tentram.